



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2022

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuknya bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (L K j I P) Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 dan merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang - bidang pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan program masing-masing.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya..

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L K j I P) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 28 – 02 – 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar**

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
4. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
5. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
6. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
7. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
8. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
9. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
10. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
11. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
12. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
13. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
14. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
15. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
16. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
17. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
18. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

19. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
20. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
21. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
22. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup diantaranya kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal, luasan Ruang Terbuka Hijau publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah, meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca, nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan, dan juga isu regulasi lingkungan.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas air, meningkatnya kualitas udara, meningkatnya kualitas lahan, meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3, serta Meningkatnya tata kelola perangkat daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dari 6 sasaran, pertama meningkatnya pengendalian pencemaran air, kedua meningkatnya pengendalian pencemaran udara, ketiga meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH, keempat meningkatnya layanan pengelolaan persampahan, kelima meningkatnya pengelolaan limbah B3, dan keenam meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Dari 6 sasaran tersebut, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran serta tingkat efisiensinya, yang mana pada tahun 2022 tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran telah seluruhnya efisien, karena seluruhnya telah memiliki rasio lebih dari 1. Diantaranya, pencapaian indikator Persentase badan air yang terpantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,08 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 92,90% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan

realisasi anggaran sebesar 98,95% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Capaian layanan persampahan perkotaan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 103,93% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,41% dan dikategorikan EFISIEN; Pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,61 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 62,02% dan dikategorikan EFISIEN; serta Pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,02 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 99,62% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan dikategorikan EFISIEN;

Keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan mendatang perlu ditingkatkan sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek – Aspek Strategis	7
F. Isu – Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	14
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi tahun 2022.....	15
2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 – 2022.....	18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional atau Realisasi Kabupaten/Kota	19
3. Perbandingan realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra.....	20
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	21
1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran	21
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	22
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
C. Prestasi / Penghargaan	38
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Langkah Perbaikan	40
Lampiran-Lampiran :	
1. Matriks Renstra 2021-2026	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2022	
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	
4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 2022	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Dalam penyusunannya, LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026. Penyusunan LKjIP menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- d. perumusan kebijakan teknis pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan;
- f. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan peyuluhan lingkungan hidup di masyarakat;
- g. penyusunan kebijakan teknis penghargaan lingkungan hidup di masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan persampahan tingkat kota;
- i. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- j. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- k. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- m. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- o. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup;
- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan kegiatan koordinasi internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai perencanaan program serta penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka

memperlancar mekanisme organisasi. Untuk membantu tugas – tugas dari Sekretariat maka dibantu oleh sub bagian-bagian.

- Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar terdiri atas 3 bidang, yaitu :

1. Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan ;
2. Bidang Pengelolaan Persampahan ;
3. Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan ;

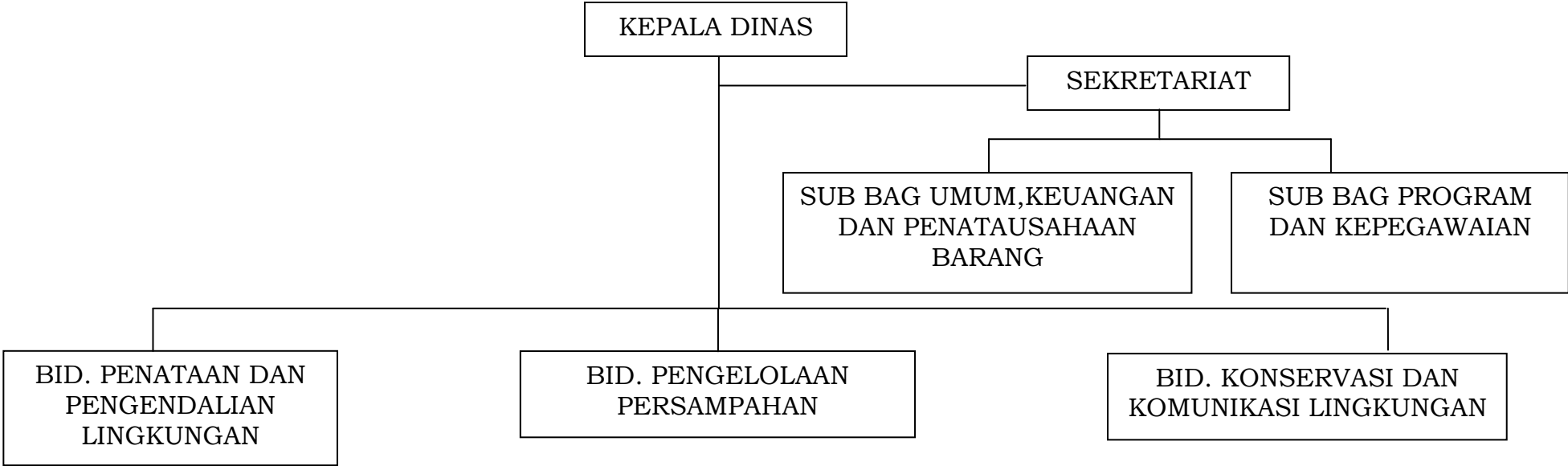
Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Penataan dan Pengendalian Lingkungan.

Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh Kepala Konservasi dan Komunikasi Lingkungan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di bidang Pengelolaan Persampahan.

Untuk memberikan gambaran pola koordinasi antar jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan melalui Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar sebagai berikut:

Gambar 2.1 SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan LKJIP adalah implementasi rangkaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan tujuan dari penyusunan LKJIP adalah :

1. Mendorong OPD untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan pelaksanaan kinerja OPD akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak - pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja OPD.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap DLH.
5. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik
6. Serta sebagai media untuk mengukur akuntabilitas keuangan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2021 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022; dan

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1). Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar ;
- 2). Adanya dukungan Sarana dan Prasarana operasional pengelolaan lingkungan dan persampahan.
- 3). Jumlah personil cukup memadai ;
- 4). Dukungan dana operasional untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas lingkungan hidup ;
- 5). Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
- 6). Terjalannya sistem koordinasi baik internal maupaun eksternal yang harmonis.
- 7). Kondisi geografis terutama kemiringan tanah yang memungkinkan limbah cair dari rumah tangga dan industri diolah pada suatu instalasi pengolahan limbah.
- 8). Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya.
- 9). Keberadaan Sumber Daya Air terutama air permukaan, relatif tetap karena mengikuti daur hidrologi.

b. Kelemahan

- 1). Kurangnya inovasi dan kreatifitas staf dan cenderung menunggu perintah pimpinan / atasannya;
- 2). Masih ada kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan ;
- 3). Lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar aturan;
- 4). Panjangnya prosedur birokrasi ;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1). Terjalannya *networking* yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- 2). Masyarakat Kota Blitar yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;

- 3). Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- 4). Kebijakan pemerintah yang semakin "memihak kepentingan" daerah.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis lingkungan hidup adalah :

1. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal. Terutama dari sisi pengurangan sampah dari sumbernya hingga dicapai kondisi *zero waste*. Hal ini dikarenakan antara lain :
 - ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk.
 - ✓ Penanganan TPA yang belum efektif, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan TPA.
 - ✓ Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat.
 - ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan di kawasan – kawasan permukiman.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan 20% dari total luas wilayah. Sedangkan kondisi saat ini di Kota Blitar, RTH publik masih berkisar 16%, termasuk Kota Blitar belum memiliki hutan kota. Ruang Terbuka Hijau selain sebagai peresapan air juga mampu mereduksi emisi dari kendaraan maupun industri.
3. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang dipicu oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca. Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca ini salah satu pemicu utamanya adalah pertambahan jumlah penduduk tiap tahun. Hal ini menjadi permasalahan bersama seluruh sektor untuk dapat menurunkan emisi GRK melalui aksi mitigasi seperti yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah.
4. Nilai IKLH yang relatif masih rendah, terutama untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Tutupan Lahan. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Air diakibatkan karena adanya limbah industri tahu, limbah domestik, dan limbah dari peternakan berperan besar mempengaruhi kualitas badan air. Sedangkan terjadinya penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan. Selain itu, penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.
5. Isu regulasi lingkungan

Perlu penegasan implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban dan kebijakan pro lingkungan yang berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

I. VISI MISI WALIKOTA

Visi Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2021-2026 adalah **“TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**.

Yang dijabarkan melalui misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG RELIGIUS, NASIONALIS, SETARA GENDER DAN BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI-ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER
3. BERDIKARI SECARA EKONOMI YANG BERORIENTASI PADA EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN PERDAGANGAN BERBASIS DIGITAL
4. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BERKEADILAN
5. MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas lingkungan hidup Daerah adalah pernyataan misi ke-4.

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya kualitas lahan
4. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengendalian pencemaran air, meningkatnya pengendalian pencemaran udara, meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH, meningkatnya layanan pengelolaan persampahan, serta meningkatnya pengelolaan limbah B3.

II. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi

1. Peningkatan pengendalian pencemaran air
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. Optimalisasi pengendalian pencemaran udara.

- 4. Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH.
- 5. Optimalisasi pengelolaan sampah.
- 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 7. Optimalisasi pengelolaan limbah B3.

Kebijakan

- 1. Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
- 2. Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
- 3. Peningkatan pembinaan pelaku usaha
- 4. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan
- 5. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas
- 6. Optimalisasi penggunaan energi alternatif
- 7. Optimalisasi pemantauan kualitas udara
- 8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
- 9. Optimalisasi layanan sampah perkotaan
- 10. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- 11. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
- 12. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- 13. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
- 14. Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
- 15. Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3

I. Tujuan & Sasaran Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)		(7)	
1	Meningkatnya kualitas air	1	Indeks kualitas air	1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	1	Persentase badan air yang terpantau
2	Meningkatnya kualitas udara	2	Indeks kualitas udara	2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	2	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan
						3	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan
3	Meningkatnya kualitas lahan	3	Indeks kualitas lahan	3	Meningkatnya ketersediaan dan	4	Persentase RTH yang terkelola

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	
				kualitas RTH		
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	4	Persentase capaian layanan persampahan	4	5	Capaian layanan persampahan perkotaan
		5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	5	6	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau
5	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	1	Persentase badan air yang terpantau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia
2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	2	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)
		3	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	4	Persentase RTH yang terkelola	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota
4	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	5	Capaian layanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani
					Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri
					Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)
					Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
(1)		(2)		(3)	(4)
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	6	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan
6	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2022 Dinas lingkungan hidup Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan kinerja sasaran dan tujuan selama Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas lingkungan hidup selama Tahun 2022 dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Metode ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/SASARAN

Pengukuran kinerja merupakan proses berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan dan atau/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi. Hasil pengukuran kinerja Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68 %
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62 %
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03 %
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93	97,73	105,09 %
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	80	100 %
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	92,86	100 %
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80	80	100 %

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10	96,10	100 %
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94	97,73	103,97 %
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	70	100 %
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62 %
Rata - Rata capaian target					97,00 %

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing kebijakan yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Berhasil** dengan nilai capaian kinerja 97,00%.

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Dinas lingkungan hidup Kota Blitar telah menetapkan 4 (empat) Kinerja Utama dengan (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 6 (enam) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2022. Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kinerja Utama 1 : Meningkatnya kualitas air

Indikator :

1. Indeks kualitas air

Perhitungan Indeks Pencemaran Air diambil dari uji badan air yang dilakukan di 19 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 18 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemar ringan, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar sedang maupun berat.

2. Kinerja Utama 2 : Meningkatnya kualitas udara

Indikator :

2. Indeks kualitas udara

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara di ambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran,

industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Pencemaran Udara..

3. **Kinerja Utama 3 : Meningkatnya kualitas lahan**

Indikator :

3. **Indeks kualitas lahan**

Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas RTH publik dan luas RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan tidak hanya berdasarkan pada luas ruang terbuka hijau (RTH) namun pada deleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 11,104602 ha luas RTH dan 546,902942 ha tutupan vegetasi relevan lainnya yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan.

4. **Kinerja Utama 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3**

4. **Persentase capaian layanan persampahan**

Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat namun belum diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah di tingkat sumber sampah. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah penurunan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

- 1. Pengolahan sampah di TPA = 22.367,20 ton/tahun
- 2. TPST 3R dan pengomposan = 1.015,60 ton/tahun
- 3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 3.720,74 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2022 sejumlah 27.732,70 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar.

5. **Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air**

Indikator :

5. **Persentase badan air yang terpantau**

19 titik lokasi yang telah ditetapkan dalam pengujian badan air telah seluruhnya dilakukan pemantauan dengan frekuensi sebanyak 2 kali pada tahun 2022.

6. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara

Indikator :

6. Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan

Aksi mitigasi yang dilaksanakan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca selama tahun 2022 adalah pengadaan solar cell, pengadaan anjang-anjang, pengadaan lampu hemat energi, serta pengadaan bibit tanaman untuk Program Kampung Iklim.

7. Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode passive sampler sebanyak 10 titik dalam satu tahun dan metode sesaat sebanyak 9 titik yang dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun. Dari titik yang dipantau, seluruhnya telah memenuhi baku mutu.

7. Kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH

Indikator :

8. Persentase RTH yang terkelola

Dengan persentase 16,27% luas RTH Publik dibandingkan dengan luasan Kota Blitar, telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar pada tahun 2022 sesuai dengan kewenangannya.

8. Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan

Indikator :

9. Capaian layanan persampahan perkotaan

Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2022 adalah 84,31%, sedangkan persentase sampah yang berkurang pada tahun 2022 adalah 13,42%.

9. Kinerja Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3

Indikator :

10. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau

Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 30 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 18 usaha yang taat, dan 12 usaha yang tidak taat.

10. Kinerja Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

11. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 84,68.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2022

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 - 2022

No.	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	57	59,92	51,58	59,73
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	99	84,53	83,76	85,9
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	41,7	55,23	38,52	31,5
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	95	93	97,84	97,73
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	85	80	100	80
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	NA	92,86	NA	92,86
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	NA	80	NA	80
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	58,91	96,10	58,81	96,10
8	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	95	94	97,84	97,73
9	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	NA	70	NA	70
10	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	85 (A)	83,14 (A)	84,68 (A)

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL ATAU REALISASI KABUPATEN/KOTA

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Keterangan
		Kota Blitar	Provinsi Jawa Timur	
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,73	56,13	Melampaui
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	85,9	84,13	Melampaui
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	31,5	47,36	Kurang dari
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	97,73	86,84	Melampaui
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	-	-
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	-	-
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80	-	-
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang dikelola	96,10	-	-
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	97,73	86,84	Melampaui
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	-	-
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,68 (A)	84,11 (A)	Melampaui

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode Renstra

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RPJMD / RENSTRA	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	67,12	59,73	88,99 %
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	88,33	85,9	97,25 %
Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	57,23	31,5	55,04 %
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	98	97,73	99,72 %
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	90	80	88,89 %
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	100	92,86	92,86 %
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	90	80	88,89 %
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100	96,10	96,10 %
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	75	97,73	130,31 %
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	80	70	87,50 %
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	84,68 (A)	95,15 %

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Tiap Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	886.925.970,00	2,72
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	1.137.489.155,00	3,49
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	9.136.516.882,00	27,99
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	14.155.785.929,00	43,37
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	42.297.800,00	0,13
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.280.421.962,00	22,31
JUMLAH		32.597.139.898,00	100,00

Total alokasi anggaran untuk 5 sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah Rp 32.597.139.898,00 yang mana terbagi dalam 7 indikator sasaran. Sasaran pertama yaitu Meningkatkan pengendalian pencemaran air memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 886.925.970,00** atau **2,72%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaran selanjutnya adalah Meningkatkan pengendalian pencemaran udara yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 1.137.489.155,00** atau **3,49%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaran selanjutnya adalah Meningkatkan ketersediaan dan kualitas RTH yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 9.136.516.882,00** atau **27,99%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Sasaran selanjutnya adalah Meningkatkan pengelolaan limbah B3 yang memiliki nilai anggaran sebesar **Rp 42.297.800,00** atau **0,13%** dari total anggaran yang telah teralokasi. Dan sasaran terakhir adalah Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang memiliki nilai anggarannya sebesar **Rp 7.280.421.962,00** atau **22,31%** dari total anggaran yang telah teralokasi.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92	59,73	99,68%	886.925.970,00	823.952.459,00	92,90%
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80	80	100%	886.925.970,00	823.952.459,00	92,90%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	54	40	74,07%	377.573.170,00	356.568.369,00	94,44%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti	100	100	100,00%	19.997.400,00	13.304.000,00	66,53%
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64	67	104,69%	143.567.900,00	111.377.600,00	77,58%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	100,00%	345.787.500,00	342.702.490,00	99,11%
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53	85,9	101,62%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86	92,86	100%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
	Persentase upaya pengendalian pencemaran	80	80	100%			

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
	udara yang dilaksanakan						
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	6,37	13,21	207,38%	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%
	Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	100,00%			
Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23	31,5	57,03%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10	96,10	100%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Program Pengelolaan Keaneka-ragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,272	16,27	99,99%	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%
Tujuan 4 : Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93	97,73	105,09%	14.155.785.929,00	13.930.300.765,70	98,41%
	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	67	60	89,55%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Sasaran 4 : Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94	97,73	103,97%	14.155.785.929,00	13.930.300.765,70	98,41%
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	83	84,31	101,58%	13.230.615.142,00	13.038.166.139,70	98,55%
	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	11	13,42	122,00%			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	100,00%	586.599.287,00	560.915.387,00	98,55%

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Hidup untuk Masyarakat							
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase kelurahan berseri	44,44	44,44	100,00%	338.571.500,00	331.219.239,00	98,55%
	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	21,84	21,84	100,00%			
	Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	100,00%			
Sasaran 5 : Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70	70	100%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	100,00%	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%
Tujuan 5 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Sasaran 6 : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	84,68 (A)	99,62%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	84,59	107,76%	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%
Rata-rata capaian kinerja utama dan anggaran sasaran strategis				102,63%	32.639.437.698,00	32.083.137.551,73	98,30%

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dan ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dijabarkan dalam beberapa program dan anggaran dengan capaian sebagai berikut :

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7,280,421,962.00	7,134,951,690.44	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78.5	84.59	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,568,000.00	35,346,000.00	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,020,000.00	9,992,500.00	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	5	5	RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,548,000.00	25,353,500.00	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	1	1	Dokumen IKM 2022
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,027,564,701.00	5,902,620,259.00	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,023,065,501.00	5,898,256,759.00	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	59	59	
Sub Kegiatan	4,499,200.00	4,363,500.00	Jumlah jenis	3	3	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,397,600.00	68,192,400.00	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	68,397,600.00	68,192,400.00	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	1	1	
			Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5	5	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	802,425,950.00	796,282,782.44	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,477,500.00	5,467,000.00	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	9	9	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,985,500.00	87,376,000.00	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	3	3	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,741,800.00	7,688,500.00	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang	2	2	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			tersedia			
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360,954,200.00	357,729,369.44	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	54	54	
			Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1,095	1185	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,412,900.00	17,010,700.00	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia	14	14	
			Jumlah lembar penggandaan	12,391	19271	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6,726,000.00	5,740,000.00	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3	3	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	316,128,050.00	315,271,213.00	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45	77	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77,599,411.00	71,145,748.00	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,599,411.00	71,145,748.00	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	3	3	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268,866,300.00	261,364,501.00	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	
Sub Kegiatan	175,876,200.00	168,654,001.00	Jumlah	36	30	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya			
			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	3	3	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,275,800.00	43,243,500.00	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4	4	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,714,300.00	49,467,000.00	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2	2	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	345,787,500.00	342,702,490.00	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100	100	
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	345,787,500.00	342,702,490.00	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1	2	
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	345,787,500.00	342,702,490.00	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	1	1	Dokumen RPPLH
			Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	1	1	Dokumen IKPLHD
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1,515,062,325.00	1,483,446,297.17	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	54	40	
			Persentase Penurunan Emisi Gas	6.37	13.21	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			Rumah Kaca (ton CO2eq)			
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100	100	
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,515,062,325.00	1,483,446,297.17	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3	3	
			Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3	3	
			Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18	18	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	377,573,170.00	356,568,368.00	Jumlah kegiatan sosialisasi/ pembinaan pencegahan pencemaran air	4	4	4 kegiatan sosialisasi
			Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan (ABA, IPAL usaha dan/atau kegiatan, IPAL domestik, IPLT)	250	250	250 lokasi uji
			Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding	4	4	P. Nurrochim P. Agus P. Hari Santoso P. Wachid

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
			(rutin dan accidental)			
			Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	4	4	truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT
			Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	3	3	
			Jumlah lokasi uji kualitas udara	10	10	10 lokasi uji kualitas udara
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1,137,489,155.00	1,126,877,929.17	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	2	2	2 kali monev
			Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	3	3	Pemasangan biopori, sumur resapan, program kampung iklim (PROKLIM)
			Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	180	180	180 peserta pembinaan
			Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	4	4	Solar cell, anjang-anjang, lampu hemat energi, bibit tanaman
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKA RAGAMAN HAYATI	9,136,516,882.00	9,040,822,707.42	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah	16.27	16.27	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
(KEHATI)			kota			
Kegiatan Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati Kabupaten/ Kota	9,136,516,882.00	9,040,822,707.42	Jumlah taman kota yang terkelola	14	14	
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,239,662,228.00	6,147,054,648.60	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	4	4	
			Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia	1	1	
Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneka ragaman Hayati Lainnya	2,896,854,654.00	2,893,768,058.82	Jumlah sarana dan prasarana taman keaneka ragaman hayati yang tersedia	7	7	
			Jumlah sarana dan prasarana taman keaneka ragaman hayati yang terpelihara	7	7	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	42,297,800.00	26,232,000.00	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100	100	
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42,297,800.00	26,232,000.00	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	35	35	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	42,297,800.00	26,232,000.00	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3	70	60	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			yang dibina			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	143,567,900.00	111,377,600.00	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64	67	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	143,567,900.00	111,377,600.00	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60	42	
Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	33,796,600.00	28,430,000.00	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	2	2	leaflet
			Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	1	1	1 kali sosialisasi
Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan	109,771,300.00	82,947,600.00	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	1	1	1 kali pembinaan
			Jumlah peserta bintek	200	70	70 peserta

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			penaatan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan			
			Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	1	1	Update aplikasi SIMPONNIK
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	60	90	90 usaha dan/atau kegiatan yang dipantau
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	586,599,287.00	514,118,887.00	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	100	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	586,599,287.00	560,934,887.00	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21	21	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	388,639,487.00	379,318,187.00	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	2	2	
			Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	5	5	Pembinaan Adiwiyata, Pembinaan Kelurahan Berseri, Pembinaan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
						Ecopesantren, Pembinaan Saka Kalpataru, dan Pelatihan Lingkungan
Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	197,959,800.00	181,616,700.00	Fasilitasi Gerdu Kasih	21	21	21 Kelurahan
			Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	7	7	Baju Satgas PROKASIH, Cangkul, Cikrak kecil, Sabit, Sabit besar, Sapu lidi, dan Sepatu Boot
			Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	1	1	Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	338,571,500.00	331,219,239.00	Persentase kelurahan berseri	44.44	44.44	
			Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	21.84	21.84	
			Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1	1	Fasilitasi penilaian Adipura telah dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan pengumumannya pada tahun 2023
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	338,571,500.00	331,219,239.00	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	14	14	
			Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	51	51	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/	338,571,500.00	331,219,239.00	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan	28	38	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			berseri			
			Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	90	90	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19,997,400.00	13,304,000.00	Persentase kasus/ aduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19,997,400.00	13,304,000.00	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	2	0	Tidak ada pengaduan yang diterima dari masyarakat untuk kemudian ditindak lanjuti
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19,997,400.00	13,304,000.00	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	2	0	
			Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	2	2	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,230,615,142.00	13,038,166,139.70	Persentase sampah tertangani	83	84.2	
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	11	12.53	
Kegiatan Pengelolaan Sampah	13,230,615,142.00	13,038,166,139.70	Volume sampah tertangani	22,508.66	22,508.66	
			Volume sampah yang terkurangi	3,113.19	3113.19	
Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan	12,356,147,642.00	12,170,565,689.70	Jumlah sarpras penanganan	8	8	

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	ANGGARAN		URAIAN	INDIKATOR		KETERANGAN
	PAGU	REALISASI		TARGET	REALISASI	
Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota			sampah yang terpelihara			
			Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	7	7	
			Jumlah lokasi kerja yang terlayani	25	25	
Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	874,467,500.00	867,600,450.00	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)	3	3	
			Jumlah lomba (bank sampah)	1	1	
			Jumlah peserta pembinaan	400	400	
			Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	8	8	

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	100 %	92,90%	1,08
2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	100 %	99,07%	1,01
		Persentase upaya pengendalian	100 %		1,01

		pencemaran udara yang dilaksanakan			
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	100 %	98,95%	1,01
4	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	103,97 %	98,41%	1,06
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	100 %	62,02%	1,61
6	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	99,62 %	98,00%	1,02

Keterangan :

≥ 1 : Efisien

< 1 : Tidak Efisien

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran telah seluruhnya efisien. Hal ini dapat dilihat dari seluruh indikator kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi diatas 1. Karena semakin tinggi rasio efisiensi maka akan semakin efisien pula penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian indikator Persentase badan air yang terpantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,08 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 92,90% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 99,07% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase RTH yang terkelola ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,01 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,95% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Capaian layanan persampahan perkotaan ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,06 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 103,93% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,41% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau ketersediaan rasio efisiensi sebesar 1,61 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 100% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 62,02% dan dikategorikan EFISIEN.

Untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah ketersediaan rasio efisiensi

sebesar 1,02 yang berarti untuk pencapaian target kinerja sebesar 99,62% dibutuhkan realisasi anggaran sebesar 98,00% dan dikategorikan EFISIEN.

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2022 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Sangat Baik) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022.
2. Juara 4 dalam Lomba Perangkat Daerah Terinovatif "*INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)*" Kota Blitar Tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2022 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun capaian dari masing-masing kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

1. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas air dengan indikator kinerja Indeks kualitas air dari target 59,92 terealisasi 59,73, capaian sebesar 99,68%. Tidak tercapainya indikator ini karena masih adanya pencemaran dari industri tahu, ternak dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Air.
2. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas udara dengan indikator kinerja Indeks kualitas udara dari target 84,53 terealisasi 85,9, capaian sebesar 101,62%.
3. Kinerja Utama Meningkatnya kualitas lahan dengan indikator kinerja Indeks kualitas lahan dari target 55,23 terealisasi 31,5, capaian sebesar 57,03%. Rendahnya capaian indeks kualitas lahan ini dikarenakan ada perubahan metode perhitungan IKL dengan metode deleniasi tutupan lahan.
4. Kinerja Utama Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3 dengan indikator kinerja Persentase capaian layanan persampahan dari target 93% terealisasi 97,73%, capaian sebesar 105,09%.
5. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengendalian pencemaran air dengan indikator kinerja Persentase badan air yang terpantau dari target 80% terealisasi 80%, capaian sebesar 100%.
6. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengendalian pencemaran udara dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dari target

92,86% terealisasi 92,86%, capaian sebesar 100%.

- b. Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan dari target 100% terealisasi 100%, capaian sebesar 100%.
7. Kinerja Sasaran Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH dengan indikator kinerja Persentase RTH yang terkelola dari target 96,10% terealisasi 96,10%, capaian sebesar 100%.
8. Kinerja Sasaran Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja Capaian layanan persampahan perkotaan dari target 94% terealisasi 97,72%, capaian sebesar 103,97%.
9. Kinerja Sasaran Meningkatnya pengelolaan limbah B3 dengan indikator kinerja Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau dari target 70% terealisasi 70%, capaian sebesar 100%.
10. Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dari target 85 (A) terealisasi 84,68 (A), capaian sebesar 99,62%. Walaupun belum memenuhi target, namun nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 telah melampaui nilai daripada tahun 2021 yaitu 83,14.

B Langkah Perbaikan

Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :
 1. Melakukan pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang membuang limbahnya ke sungai untuk membuat IPAL.
 2. Melakukan pembangunan IPAL tahu terpusat.
 3. Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.
- b. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :
 1. Pengadaan alat uji emisi transportasi
 2. Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin
- c. Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :
 1. Penanaman tanaman peneduh di sepanjang jalan, dan mempertahankan tanaman yang sudah ada.
 2. Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung peningkatan IKL.
 3. Menyusun regulasi yang mewajibkan penanaman tanaman peneduh sesuai dengan kriteria.

4. Melakukan sosialisasi penanaman pohon peneduh ke masyarakat.
- d. Untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA, perlu dilakukan :
1. Optimalisasi pemilahan sampah di TPS.
 2. Penyusunan FS Pembangunan incinerator sampah domestik.
 3. Pembangunan TPA Regional.
 4. Revitalisasi cell lama dan penambahan armada pengangkutan sampah.
 5. Menginiasi pembentukan rumah maggot terpusat di TPST 3R Kelurahan Blitar
 6. Peningkatan edukasi Bank Sampah di masyarakat

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Dinas lingkungan hidup Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas lingkungan hidup Kota Blitar.

Blitar, 28 - 02 - 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199303 2 047

Lampiran 1. Matriks Renstra 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
1	2	4	5	6	7	8	K	Rp	9	10
1	Meningkatnya kualitas air			Indeks Kualitas Air		56,32 Indeks	59,92 Indeks		Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya pengendalian pencemaran air		Prosentase badan air yang terpantau		NA	80%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu / Jumlah total titik sampling badan air) x 100%	52,63%	54%	416.953.120		
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana dalam satu tahun	NA	3 aksi	416.953.120		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	NA	4 kali	416.953.120		
				Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan (ABA, IPAL usaha dan/atau kegiatan, IPAL domestik, IPLT)	Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan dalam satu tahun	NA	250 lokasi			
				Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding (rutin dan accidental)	Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding dalam satu tahun	NA	4 orang			
				Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara dalam satu tahun	NA	4 unit			
				Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air dalam satu tahun	NA	3 unit			
				Jumlah lokasi uji kualitas udara	Jumlah lokasi uji kualitas udara dalam satu tahun	NA	10 lokasi			
				Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara	Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan udara dalam satu tahun	NA	0			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / Jumlah total kasus/aduan lingkungan hidup) x 100%	100%	100%	19.997.400		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	NA	2 kasus/aduan	19.997.400		
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar dalam satu tahun	NA	2 kasus/aduan	19.997.400		
				Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	NA	2 kali			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	(Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup / Jumlah total pelaku usaha yang dipantau) x 100%	64%	64%	143.567.900		
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup dalam satu tahun	NA	60 usaha	143.567.900		
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana dalam satu tahun	NA	2 jenis	33.796.600		
				Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan dalam satu tahun	NA	1 kali			
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan dalam satu tahun	NA	1 jenis	109.771.300		
				Jumlah peserta bintek penataan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan	Jumlah peserta bintek penataan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan dalam satu tahun	NA	200 orang			
				Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan) dalam satu tahun	NA	1 jenis			
				Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan)	Jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang di pantau (evaluasi hasil pemantauan pengawasan) dalam satu tahun	NA	60 usaha			
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	(Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia / Jumlah total dokumen perencanaan lingkungan hidup) x 100%	100%	100%	245.787.500		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun dalam satu tahun	NA	1 dokumen	245.787.500		
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dalam satu tahun	NA	1 dokumen	245.787.500		
				Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun	Jumlah dokumen IKPLHD yang tersusun dalam satu tahun	NA	1 dokumen			
	Meningkatnya kualitas udara			Indeks Kualitas Udara		82,63 Indeks	84,53 Indeks			
		Meningkatnya pengendalian pencemaran udara		Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan		NA	92,86%			
				Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan		NA	80%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	((Nilai Proyeksi Emisi GRK - Nilai Emisi GRK hasil perhitungan http://signsmart.menlhk.go.id/)/Nilai Proyeksi Emisi GRK) x 100 %	NA	6,37%	1.336.978.647		
				Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	(Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu / jumlah total titik sampling udara ambien yang dipantau) x 100%	100%	100%			
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim dalam satu tahun	NA	3 kali	1.336.978.647		
				Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu dalam satu tahun	NA	18 titik			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim dalam satu tahun	3 kali	2 kali	1.336.978.647		
				Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan dalam satu tahun	NA	3 aksi			
				Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim dalam satu tahun	NA	180 orang			
				Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK dalam satu tahun	NA	4 aksi			
	Meningkatnya kualitas lahan			Indeks kualitas lahan		54,23 Indeks	55,23 Indeks			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH		Persentase RTH yang terkelola		NA	96,10%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	Luas RTH Publik x 100% / Luas Wilayah Kota Blitar	16,27%	16,27%	5.441.447.600		
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah taman kota yang terkelola	Jumlah taman kota yang terkelola dalam satu tahun	NA	14 taman	5.441.447.600		
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara dalam satu tahun	7 buah	4 jenis	2.485.520.185		
				Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia	Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia dalam satu tahun	6 buah	1 jenis			
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia dalam satu tahun	NA	7 jenis	2.955.927.415		
				Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara dalam satu tahun	NA	7 jenis			
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3			Persentase capaian layanan persampahan		92,10%	93%			
					Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		67%	67%		
			Capaian layanan persampahan perkotaan		Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	92,50%	94%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	((Volume sampah tertangani / timbulan sampah) x 100%)	82,88%	83%	16.269.473.260		
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	((Volume sampah yang dikelola berbasis 3R / timbulan sampah) x 100%)	9,62%	11%			
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	Volume sampah tertangani dalam satu tahun	NA	22.508,66 ton	16.269.473.260		
				Volume sampah yang berkurang	Volume sampah yang berkurang dalam satu tahun	NA	3.113,19 ton			
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara dalam satu tahun	2 jenis	8 jenis	15.439.774.948		
				Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia dalam satu tahun	7 jenis	7 jenis			
				Jumlah lokasi kerja yang terlayani	Jumlah lokasi kerja yang terlayani dalam satu tahun	25 lokasi	25 lokasi			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah) dalam satu tahun	3 kelompok	3 kelompok	829.698.312		
				Jumlah lomba (bank sampah)	Jumlah lomba bank sampah yang diselenggaakan dalam satu tahun	1 jenis	1 jenis			
				Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan dalam satu tahun	300 orang	400 orang			
				Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia dalam satu tahun	NA	8 jenis			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	((Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina / jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan di Kota Blitar) x 100%)	100%	100%	587.347.900		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina dalam satu tahun	NA	21 kelompok	587.347.900		
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia dalam satu tahun	NA	2 jenis	389.388.100		
				Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat dalam satu tahun	NA	5 jenis			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Fasilitasi Gerdu Kasih	Jumlah lokasi fsilitasi Gerdu Kasih dalam satu tahun	NA	21 lokasi	197.959.800		
				Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia dalam satu tahun	NA	7 jenis			
				Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana dalam satu tahun	NA	1 kali			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah kelurahan x jumlah predikat yang seharusnya diperoleh (3 prestasi)) x 100%	38,10%	44,44%	383.600.800		
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	((Jumlah predikat yang diperoleh / jumlah sekolah x jumlah predikat seharusnya (4 prestasi)) x 100%	17,48%	21,84%			
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	Jumlah predikat yang didapat dalam satu tahun	1 kali	1 kali			
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh dalam satu tahun	NA	14 predikat	383.600.800		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
				Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh dalam satu tahn	NA	51 predikat			
			Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri dalam satu tahun	NA	28 kelurahan	383.600.800		
				Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina dalam satu tahun	NA	90 sekolah			
		Meningkatnya pengelolaan limbah B3		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	(Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%	NA	70%			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	(Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan / Jumlah total pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang dipantau) x 100%	100%	100%	20.689.100		
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan dalam satu tahun	NA	35 usaha/kegiatan	20.689.100		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina dalam satu tahun	NA	70 usaha/kegiatan	20.689.100		
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A			
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dalam satu tahun	78,06	78,5	6.870.640.108		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar/ dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun) X 100%	100%	100%	35.568.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA) dalam satu tahun	6 jenis	5 jenis	10.020.000		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun dalam satu tahun	1 jenis	1 jenis	25.548.000		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar/Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan) x 100%	100%	100%	5.917.480.957		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	NA	59 orang	5.912.981.757		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran) dalam satu tahun	5 dokumen	3 dokumen	4.499.200		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	(Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar/Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah) x 100%	100%	100%	58.502.100		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah dalam satu tahun	3 jenis	1 jenis	58.502.100		
				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti dalam satu tahun	0 event	5 event			
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Administrasi umum perangkat daerah sesuai standar/administrasi umum perangkat daerah yang tersedia) x 100%	100%	100%	622.719.100		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dalam satu tahun	38 jenis	9 jenis	5.477.500		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	8 jenis	3 jenis	31.981.300		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dalam satu tahun	8 jenis	2 jenis	7.741.800		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia dalam satu tahun	50 jenis	54 jenis	343.381.200		
				Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia dalam satu tahun	1.187 dos/ kotak	1.095 dos/ kotak			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah Jenis barang cetakan yang tersedia dalam satu tahun	24 jenis	14 jenis	17.412.900		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2022			
				Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia dalam satu tahun	7.253 lembar	12.391 lembar			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia dalam satu tahun	36 buah	3 jenis	6.726.000		
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti dalam satu tahun	9 rapat	45 rapat	209.998.400		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar/ penyediaan jasa penunjang urusan yang dilaksanakan) x 100%	NA	100%	65.599.351		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet)	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, telepon, internet dalam satu tahun	3 rekening	3 rekening	65.599.351		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(BMD yang terpelihara sesuai standar/ BMD yang terpelihara) x 100%	NA	100%	170.770.600		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya dalam satu tahun	5 kendaraan	36 kendaraan	110.148.900		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara dalam satu tahun	8 unit	3 unit			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	14 jenis	4 jenis	28.856.600		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara dalam satu tahun	2 unit	-	0		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dalam satu tahun	9 jenis	2 jenis	31.765.100		

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. JAJUK INDIHARTATI

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BLITAR



Ir. JAJUK INDIHARTATI

Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	59,92 Indeks
2	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,53 Indeks
3	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks kualitas lahan	55,23 Indeks
4	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Persentase capaian layanan persampahan	93,00 %
5	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Persentase badan air yang terpantau	80,00 %
6	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86 %
7	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80,00 %
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	96,10 %
9	Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94,00 %
10	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70,00 %
11	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,00 (Nilai)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.280.421.962,00	DAU
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	345.787.500,00	DAU
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.515.062.325,00	DAU
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.136.516.882,00	DAU
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	42.297.800,00	DAU
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	143.567.900,00	DAU
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	586.599.287,00	DAU
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	338.571.500,00	DAU
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.997.400,00	DAU
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.230.615.142,00	DAU
JUMLAH		32.639.437.698,00	

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA BLITAR



Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 196612311993032047

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Prosentase badan air yang terpantau	80%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	54%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah kegiatan sosialisasi /pembinaan pencegahan pencemaran air	4 kali	377.573.170,00
							Jumlah lokasi uji effluen usaha dan/atau kegiatan (ABA, IPAL usaha dan/atau kegiatan, IPAL domestik, IPLT)	250 lokasi	
							Jumlah petugas IPLT yang terfasilitasi extrafooding (rutin dan accidental)	4 orang	
							Jumlah sarana pengelolaan limbah domestik yang dipelihara (truck tinja, aplikasi SIDOTI, mesin IPLT, gedung IPLT)	4 unit	
							Jumlah sarpras pelaksanaan pencegahan pencemaran air	3 unit	
							Jumlah lokasi uji kualitas udara	10 lokasi	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ada di Kota Blitar	2 kasus/aduan	19.997.400,00
							Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	2 kali	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	64%	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah jenis sarana/akses informasi dan publikasi yang terlaksana	2 jenis	33.796.600,00
							Jumlah sosialisasi/ pembinaan ketentuan persetujuan lingkungan	1 kali	
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pembinaan bagi usaha dan/atau kegiatan	1 jenis	109.771.300,00
							Jumlah peserta bintek pnaatan dokumen lingkungan bagi usaha dan / atau kegiatan	200 orang	
							Jumlah sarpras pelaporan yang tersedia (update aplikasi pelaporan lingkungan)	1 jenis	
Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	92,86%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	6,37%	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Frekwensi monev adaptasi mitigasi perubahan iklim	2 kali	1.137.489.155,00
	Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	80%		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%		Jumlah aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan	3 aksi	
							Jumlah peserta pembinaan program kampung iklim	180 orang	

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
							Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan untuk mengurangi emisi GRK	4 aksi	
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang dikelola	96,10%	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,27%	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah jenis sarpras taman kota yang dipelihara	4 jenis	6.239.662.228,00
							Jumlah jenis sarpras taman kota yang tersedia	1 jenis	
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang tersedia	7 jenis	2.896.854.654,00
							Jumlah sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati yang terpelihara	7 jenis	
Meningkatnya layanan pengelolaan persampahan	Capaian layanan persampahan perkotaan	94%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83%	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras penanganan sampah yang terpelihara	8 jenis	12.356.147.642,00
				Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	11%		Jumlah sarpras penanganan sampah yang tersedia	7 jenis	
							Jumlah lokasi kerja yang terlayani	25 lokasi	
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelompok yang dibina (Pengirit, Pemilah, Bank Sampah, pelapak sampah)	3 kelompok	874.467.500,00
							Jumlah lomba (bank sampah)	1 jenis	
							Jumlah peserta pembinaan	400 orang	
							Jumlah jenis sarana prasarana pengurangan sampah yang tersedia	8 jenis	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis sarana / akses informasi dan publikasi yang tersedia	2 jenis	388.639.487,00
							Jumlah jenis pembinaan untuk kelompok masyarakat	5 jenis	
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Fasilitasi Gerdu Kasih	21 lokasi	197.959.800,00
							Jumlah jenis sarpras Gerdu Kasih (peralatan kerja) yang tersedia	7 jenis	
							Jumlah kegiatan peringatan hari-hari peringatan LH yang terlaksana	1 kali	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	44,44%	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan yang masuk kriteria kelurahan berseri	28 kelurahan	338.571.500,00
				Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	21,84%		Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata) yang dibina	90 sekolah	
				Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali				

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	70%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil LB3 yang dibina	70 usaha/kegiatan	42.297.800,00
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	5 jenis	10.020.000,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen IKM yang tersusun	1 jenis	25.548.000,00
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	59 orang	6.023.065.501,00
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	3 dokumen	4.499.200,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Publikasi Program/ kegiatan Perangkat Daerah	1 jenis	68.397.600,00
							Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	5.477.500,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	3 jenis	87.985.500,00
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	2 jenis	7.741.800,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	54 jenis	360.954.200,00
							Jumlah dos/kotak makanan dan minuman	1.095 dos/ kotak	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	14 jenis	17.412.900,00
							Jumlah lembar penggandaan	12.391 lembar	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	6.726.000,00
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rapat	316.128.050,00
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (listrik, , telepon, internet)	3 rekening	77.599.411,00

SASARAN			PROGRAM			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	48 kendaraan	175.876.200,00
							Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	4 unit	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 jenis	43.275.800,00
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	2 jenis	49.714.300,00

Blitar 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI

Pembina Utama Muda

NIP. 196612311993032047

**PENGUKURAN KINERJA KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

Perangkat Daerah / Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2022		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2022		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	Meningkatnya pengendalian pencemaran air	Prosentase badan air yang terpantau	((Jumlah badan air yang dipantau / Jumlah badan air yang ditetapkan) x 100%)	80%	80%	100,00%		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	377.573.170,00	356.568.369,00	94,44%	
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	19.997.400,00	13.304.000,00	66,53%	
								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	143.567.900,00	111.377.600,00	77,58%	
								Program Perencanaan Lingkungan Hidup	345.787.500,00	342.702.490,00	99,11%	
2	Meningkatnya pengendalian pencemaran udara	Persentase rencana aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan	((Jumlah aksi yang dilaksanakan / Jumlah aksi yang ditetapkan) x 100%)	92,86 %	92,86%	100,00%		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.137.489.155,00	1.126.877.929,17	99,07%	
		Persentase upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan	((Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang terlaksana / Jumlah upaya pengendalian pencemaran udara yang direncanakan) x 100%)	80%	80%	100,00%						
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas RTH	Persentase RTH yang terkelola	((Luas RTH yang terkelola / Luas RTH yang ditetapkan) x 100%)	96,10 %	96,10%	100,00%		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9.136.516.882,00	9.040.822.707,42	98,95%	
4	Capaian layanan persampahan perkotaan	Persentase capaian layanan persampahan	Jumlah Persentase penanganan sampah + persentase pengurangan sampah	94%	97,69%	103,93%		Program Pengelolaan Persampahan	13.230.615.142,00	13.038.166.139,70	98,55%	
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	586.599.287,00	560.915.387,00	95,62%	
								Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	338.571.500,00	331.219.239,00	97,83%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2022		KET.	PROGRAM	PAGU Rp	TAHUN 2022		KET.
					REALISASI	%				REALISASI	%	
5	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau	((Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dipantau / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3) x 100%)	70%	70%	100,00%		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	42.297.800,00	26.232.000,00	62,02%	
6	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	100,00%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.280.421.962,00	7.134.951.690,44	98,00%	

Blitar 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI

Pembina Utama Muda

NIP. 196612311993032047